

KOMPLEKSITAS PENANGANAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN

Oleh: Tri Noor Aziza, SP, MP dan Rustan A., SP¹

Abstract

Food resilience as an especial system taken as as prosperity measuring rod a nation, requiring complex handling by entangling all subsistem having an effect on.

In order not to to food crisis, totality strategy supporter of reinforcement of food resilience need optimise of role and function. UU No. 7 Year 1996 about food commend the importance of attention to make-up of food resilience utilize to realize secure and prosperous Indonesia society, prosperous, with quality, and competitive.

Keywords : Penguatan, Ketahanan Pangan

Latar Belakang

Masa depan Bangsa Indonesia kembali ditantang dengan hadirnya kembali problematika yang mengancam hajat hidup orang banyak. Masalah yang timbul adalah Ketahanan Pangan. Meskipun Departemen Pertanian telah mengamankan 3 program peningkatan ketahanan pangan yaitu peningkatan produksi, keterjangkauan (distribusi), dan konsumsi namun, hal tersebut belum mampu memperbaiki keadaan ketahanan pangan nasional. Bahkan ada kecenderungan untuk mengarah pada kerawanan pangan diakibatkan banyak parameter yang berpengaruh secara kompleks pada sistem penguatan ketahanan pangan dari tingkat nasional, regional, rumah tangga, hingga individu. Pangan sebagai kebutuhan pokok memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung yang sangat luas, termasuk dengan kondisi kesehatan, kecerdasan dan produktivitas sumberdaya manusia, bahkan juga ketentraman, ketertiban dan keamanan. Secara riil memang Indonesia masih selalu bersifat reaktif terhadap setiap permasalahan yang timbul (bahkan berkali-kali timbul) dikarenakan bangsa ini belum mampu melakukan perencanaan yang matang akibat memandang pemecahan masalah dengan mono sektoral saja. Padahal penguatan ketahanan pangan adalah mekanisme holistik dan integral dengan melibatkan seluruh sendi dan aspek yang berpengaruh pada posisi ketahanan pangan, sehingga perlu disusun suatu design tertentu dengan memperhatikan seluruh aspek pendukung dan penghambat keberlangsungan ketahanan pangan yang saat ini berada pada titik kritis.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi di mana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam hal jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas keamanan, distribusi yang merata dan kemampuan membeli. Hal senada juga diungkap dalam PP No 68 Tahun 2002 yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Berdasar hal tersebut, ketahanan pangan dikatakan berhasil jika terpenuhi kecukupan pangan pada tingkat terkecil dalam hal jumlah, gizi, dan keterjangkauan.

¹ Penulis adalah staff bidang kajian pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III LAN Samarinda

Masalah ketahanan pangan bukan hanya terjadi di Indonesia, banyak negara juga mengalami masalah ini. Perkiraan FAO 1 dari 7 penduduk dunia mengalami kerawanan pangan, bahkan kelangsungan hidup sekitar 854 juta penduduk dunia terancam. Jumlah itu tersebar di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) sebanyak 820 juta, di negara-negara maju 9 juta, dan 25 juta di negara-negara transisi (FAO, 2007). Selain ancaman kelangsungan hidup, kerawanan pangan akan mendorong pada rendahnya kualitas dan kecerdasan SDM serta kesehatan. Secara kontekstual secara gamblang menggambarkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, lahan yang begitu luas, tanah yang subur, serta didukung oleh SDM yang begitu banyak (\pm 220 juta jiwa penduduk Indonesia dengan 90 juta berprofesi sebagai petani) memberikan jaminan persoalan ketahanan pangan tidak terjadi. Produksi komoditas pangan nabati dan hewani beberapa tahun terakhir pun telah menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang menggembirakan.

Tabel 1,
Perkembangan Produksi Pangan (.000 ton)

komoditas	Tahun		Laju Pertumbuhan (% Per Tahun)
	2003	2004	
Pangan Nabati			
Padi	52.138	54.088	3,74
Jagung	10.886	11.355	4,31
Kedelai	672	731	8,78
Kacang Tanah	786	837	6,49
Ubi kayu	18.524	19.507	5,31
Ubi jalar	1.991	1.876	(5,78)
sayuran	8.575	8.699	1,45
Buah-buahan	13.551	13.936	2,84
M. kelapa Sawit	10.683	12.366	15,75
Gula	1.632	2.020	23,77
Pangan Hewani			
Daging sapi	410	426	3,90
Daging Unggas	1.117	1.142	2,24
Telur	974	1.051	7,91
Susu	553	596	7,78
Ikan	5.841	6.231	6,68

Sumber : BPS 2003 - 2004, Setelah Diolah

Program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pada beberapa komoditas tertentu belum mampu menjamin ketahanan pangan nasional terlebih ditingkat rumah tangga karena swasembada hanya menyentuh satu aspek yaitu produksi. Salah satu dari sekian banyak faktor yang berpengaruh pada ketahanan pangan diantaranya adalah distribusi pangan. Distribusi pangan yang diharapkan dapat menjamin pemerataan pangan hingga ke pelosok daerah tidak dapat berjalan baik karena terkendala jarak, kemudahan akses, sistem dan sarana transportasi serta mahalnya biaya distribusi. Sehingga untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh diperlukan sinkronisasi segala aspek yang berpengaruh dengan disertai pengawasan dan evaluasi. Sinkronisasi penguatan ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan

memperhatikan beberapa indikator penting berdasarkan amanat Undang-Undang yaitu: ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan serta kualitas/ keamanan pangan disamping faktor sosial budaya, kependudukan, ekonomi, ekologis, dan kebijakan politik.

Perhatian serius pada program ketahanan pangan mengindikasikan jika salah satu ukuran kesejahteraan suatu bangsa adalah kemampuan untuk lepas dari masalah ketahanan pangan. Meskipun, dalam mewujudkan ketahanan pangan pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, namun keberhasilan program ketahanan pangan ini merupakan tanggung jawab kita semua secara aktif sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1996. Jika hal ini disadari dengan baik maka dapat dipastikan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa sesuai dengan yang diidam-idamkan oleh setiap bangsa akan terwujud serta secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM yang dapat diandalkan serta berdaya saing.. Situasi ini akan membuat perasaan tenteram rakyat, tiap individu merasa bermartabat karena tidak kelaparan, dan bangsa menjadi berdaulat karena tidak bergantung pada bangsa lain dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Zaman yang semakin berkembang menuntut pula perbaikan pola penanganan seiring dengan arus globalisasi ini. Pemecahan masalah ketahanan pangan dengan pendekatan sektoral tidak akan berpengaruh banyak pada perbaikan ke depan. Subitem-subitem penguat ketahanan pangan perlu dipermantap dengan subsistem-subsistem lain sebagai suatu mata rantai yang tidak terpisahkan. Untuk itu, pengkajian terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat sangat diperlukan untuk memperkuat sistem ketahanan pangan bangsa ini.

SISTEM TERPADU KETAHANAN PANGAN

Secara lebih luas sistem ketahanan pangan dipengaruhi oleh banyak sub sistem yang secara garis besar digolongkan ke dalam 8 (delapan) bagian besar seperti yang terlihat pada Gambar 1 (Peta Karya Sistem Ketahanan Pangan). Setiap bagian dari subsistem tersebut memberikan dampak terhadap aksi-reaksi yang diberlakukan.

- **Sub Sistem Produksi**

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa komoditas pangan nasional telah meningkat dengan laju pertumbuhan antara 1 – 10 % untuk lima tahun terakhir dan keberlanjutan peningkatan produksi harus terus dijaga dan ditingkatkan. Akan tetapi, ada kekhawatiran produksi pangan ini di masa mendatang dikarenakan adanya penciptaan lahan akibat alih fungsi sebesar 10.000 ha/ tahun untuk kepentingan perumahan, perindustrian, dan lain-lain. Mengatasi hal ini, beberapa daerah seperti, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan telah mengeluarkan komitmen pengendalian alih fungsi lahan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi dalam negeri dan mencegah alih fungsi lahan dengan menetapkan kawasan lahan abadi yang tidak bisa dialihfungsikan sebanyak 30 juta hektar yang saat ini (2008) tengah digodok penyusunan undang-undangnya. Rencananya dari 30 juta hektar ini, 15 juta hektar diantaranya berada di lahan kering sedang sisanya berada di lahan irigasi

Faktor lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah status kepemilikan/ penguasaan lahan pertanian dimana sebagian besar petani Indonesia memiliki lahan kurang dari 0,5 ha. Dengan kecilnya lahan yang dimiliki tentu hasil pangan yang diperoleh juga kecil. Usaha perluasan lahan atau ekstensifikasi pertanian merupakan salah satu langkah disamping melakukan kegiatan intensifikasi lahan yang dimiliki dua model ini diyakini akan mampu

meningkatkan kapasitas produksi hasil pangan. Penentu peningkatan produksi juga dipengaruhi oleh cara bercocok tanam yang masih konvensional. Pengelolaan lahan pertanian di beberapa daerah masih menggunakan tenaga hewan dalam membajak sawah, pengaturan jarak tanam yang belum dipahami, penerapan panca usaha tani yang belum dioptimalkan juga berpengaruh pada tingkat optimalisasi produksi pertanian.

Penguasaan teknologi bagi para petani juga akan mampu meningkatkan produksi lahan yang digunakan. Penerapan teknologi pada saat menanam, memanen, hingga pasca panen selain dapat menghemat waktu, juga berdampak pada peningkatan produksi, sebagai contoh pengelolaan pasca panen tanpa menggunakan mesin perontok padi mengalami resiko kehilangan hasil panen sebesar 2 hingga 5 persen. Bagi nelayan Indonesia penggunaan jala, pukat, dan perahu bermotor telah diadopsi untuk mendapatkan tangkapan yang lebih banyak.

Di negara-negara maju lahan sempit ternyata bukan masalah untuk mewujudkan swasembada pangan, penguasaan teknologi modern dapat meningkatkan produksi pangan hingga dua kali lipat produksi biasa. Penerapan sistem hidroponik, sistem penanaman dalam pot (polybag), inseminasi buatan, kawin suntik, dan lain-lain merupakan contoh penggunaan teknologi dalam peningkatan produksi pangan yang tentunya dapat meningkatkan ketahanan pangan.

Mungkin kita perlu belajar dari Vietnam, walaupun dulu kita pernah mensupply bahan pangan ke negara tersebut ketika terjadi perang, namun keadaannya sekarang justru berbalik. Keberhasilan yang diraih Vietnam untuk mencapai kondisi sekarang tidak diperoleh dengan serta merta tapi melalui keseriusan, kerja keras, kedisiplinan, kekompakan dan ketulusan semua unsur. Hasilnya, pembangunan pertanian mereka tanpa terasa banyak mengalami kemajuan. Uniknya, pemerintah Vietnam dikabarkan tak memberikan subsidi apa pun bagi usaha pertanian misalnya, benih, pupuk (semua produk impor), kredit bank, dll. Untuk andalan pendapatan petani produksi dimotivasi untuk ekspor, sedangkan untuk pasar lokal didorong keanekaragaman kualitas produksi dengan harga dan segmen pasar bervariasi sesuai kemampuan konsumen.

Terkait dengan penerapan teknologi, penggunaan bibit unggul dalam usaha tani juga berpengaruh pada peningkatan jumlah panen dalam setahun menjadi 3 sampai 4 kali. Penggunaan bibit unggul juga memberikan hasil yang lebih baik, lebih besar, lebih banyak, dan lebih tahan penyakit. Baru-baru ini telah banyak hasil penelitian tanaman pangan yang menemukan varietas unggul yang cocok untuk dikembangkan di lahan pertanian Indonesia, sebagai contoh jagung varietas Mr. 14, Bima I, Sukmaraga dan Lamuru serta padi varietas hibrida PP1, Cihayang, Way Apo Buru, Memberamo, dan lain-lain. Pemerintah mewujudkan keberpihakannya kepada petani dengan memberikan benih unggul kepada petani secara cuma-cuma, subsidi harga pupuk dan alsintan, melakukan vaksinasi kepada hewan-hewan ternak agar tidak terjangkit penyakit, dan lain-lain. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan dari luar (import).

- Sub Sistem Distribusi

Ketidakmudahan pemerataan hasil produksi pangan ke wilayah-wilayah terpencil atau ke daerah-daerah rawan pangan salah satunya dikarenakan tidak adanya data dan informasi mengenai daerah-daerah rawan pangan yang dimiliki. Luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Marauke sekitar 1.904.556 km² dengan beribu pulau-pulau yang tersebar mengakibatkan informasi dan data potensi daerah rawan pangan cukup sulit di kumpulkan.

Sulitnya medan dan jarak yang harus ditempuh juga merupakan faktor penghambat pendistribusian, ditambah sumberdaya aparat yang terbatas semakin memperparah kondisi penguatan ketahanan pangan. Banyaknya jalanan yang rusak serta belum dapat dilewati merupakan satu dari sekian banyak masalah dari segi infrastruktur. Dalam hal ini perbaikan infrastruktur pendukung perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Sarana dan sistem transportasi yang menunjang penyaluran pangan tersebut juga terbatas, terutama bagi daerah yang harus dilalui dengan menggunakan perahu, atau pesawat perintis. Indonesia dengan beribu pulaunya membutuhkan kerja yang ekstra keras dalam hal pendistribusian ini, tentunya peran partisipatif dengan berbagai pihak dalam mendukung program ketahanan pangan ini sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah melalui kebijakan umum ketahanan pangan pada tataran distribusi telah mengeluarkan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana untuk efisiensi distribusi dan perdagangan pangan. Pemerintah mengembangkan sarana, prasarana dan pengaturan distribusi pangan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sistem distribusi pangan yang efisien. Perhatian khusus diberikan pada daerah-daerah terpencil yang rawan terhadap gangguan bencana alam. Selain itu juga mengurangi dan/atau menghilangkan Perda yang menghambat distribusi pangan antar daerah yang dapat mengakibatkan tingginya biaya retribusi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tidak harus menanggung biaya distribusi yang memberatkan, baik terhadap input produksi maupun terhadap hasil produksi pangan.

- Sub Sistem Konsumsi

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Berdasarkan data statistik dengan konsumsi perkapita rata-rata yang mencapai 114 kg/ kapita/ tahun menunjukkan kalau bangsa Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan bangsa Jepang (60 kg/ kapita/ tahun), Malaysia (80 kg/ kapita/ tahun), Thailand (90 kg/ kapita/ tahun), dan rata-rata dunia (60 kg/ kapita/ tahun). Tingginya konsumsi beras mengakibatkan 50 juta ton beras yang kita hasilkan setiap tahun, tidak mencukupi kebutuhan nasional.

Derasnya aliran pangan impor ke dalam negeri menjadikan kita perlu berhati-berhati mengenai keamanan pangan tersebut. Kasus TPA Bantar Gebang perlu menyadarkan kita bahwa bukan jaminan pangan impor itu bermutu dan aman, justru merupakan pangan sisa dan tidak memenuhi kalayakan konsumsi yang dikirim ke Negara tercinta ini. Selain itu, kandungan bahan kimia produk pangan baik domestik maupun impor juga perlu mendapat perhatian serius guna memantapkan ketahanan pangan. Banyak kasus yang saat ini tercuat mengenai keamanan pangan di dalam negeri, dimulai dengan ditemukannya kandungan minyak babi pada produk yang berlabel halal, kasus tanaman transgenik dari Amerika, kasus di temukannya kandungan formalin pada produk yang telah puluhan tahun merajalela di pasar Indonesia. Meskipun dampak dari bahan-bahan kimia tersebut tidak langsung nyata terlihat, namun akumulasi penumpukannya di dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai penyakit kronis yang berujung pada kematian.

Perhatian lain yang berkaitan dengan konsumsi adalah pengetahuan masyarakat akan gizi makanan yang baik. Prinsip yang penting mengenyangkan di kalangan masyarakat tanpa memperdulikan kecukupan gizi sesuai anjuran Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) sebanyak 2.200 kkal/ kapita/ hari memperparah kondisi angka kecukupan gizi dalam negeri yang masih berada di bawah standar. Asupan gizi yang tidak memenuhi standar

akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan yang tidak normal, seperti busung lapar (kwashiorkor) atau biasa dikenal dengan istilah marasmus, defisiensi vitamin dan mineral, kondisi malnutrisi, dan sebagainya yang tentunya menggambarkan pengurusan kesejahteraan yang tidak merata di dalam bangsa ini. Pentingnya pemberian penyuluhan gizi dan kesehatan bagi masyarakat akan sangat penting tidak hanya mereka yang tinggal di desa tetapi juga mereka yang berdomisili di daerah perkotaan.

Bahan pangan untuk konsumsi sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok besar. Jenis pangan pada masing-masing kelompok dapat berbeda pada setiap daerah/ kota sesuai sumberdaya pangan yang tersedia. Secara nasional bahan pangan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Padi-padian : beras, jagung, sorghum dan terigu
2. Umbi-umbian : ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas dan sagu.
3. Pangan hewani : ikan, daging, susu dan telur.
4. Minyak dan lemak : minyak kelapa, minyak sawit
5. Buah/biji berminyak : kelapa daging
6. Kacang-kacangan : kedelai, kacang tanah, kacang hijau
7. Gula : gula pasir, gula merah.
8. Sayur dan buah : semua jenis sayuran dan buah-buahan yang biasa dikonsumsi.
9. Lain-lain : teh, kopi, coklat, sirup, bumbu-bumbuan, makanan dan minuman jadi

Dalam hubungan dengan sistem ketahanan pangan nasional, peranan pengembangan pangan lokal dalam mendukung diversifikasi pangan sangat besar mengingat peran konsumsi sangat vital sebagai strategi untuk mengalihkan pangan beras ke pangan non beras juga ke pangan tradisional. Diversifikasi pangan bertujuan untuk menganekaragamkan menu konsumsi pangan sehingga orientasi ke “beras” bisa dikurangi. Pemanfaatan pangan lokal sebagai menu andalan hanya terlihat di beberapa daerah seperti sagu, ikan, jagung, ketela pohon, dan ubi jalar. Padahal dalam hal kalori yang dihasilkan tidak kalah dengan beras.

- Sub Sistem Ekonomi

Liberalisasi perdagangan yang dicanangkan memiliki dampak pada kesiapan produk dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk luar negeri. Tidak hanya dalam hal kuantitas dan kualitas yang menjadi patokan konsumen, harga pun turut pula menjadi bagian penilaian dari persepsi konsumen. Namun, perlu diperhatikan secara serius pula adanya jebakan pangan yang menggantung nasib pangan nasional pada kekuatan impor, dimana jika produk lokal tidak mampu bersaing dapat berakibat kekuatan pasar internasional mempermainkan kebijakan komoditas pangan dalam negeri. Kondisi ekstrim ini dapat dijadikan lahan bisnis yang menggiurkan bagi para penguasa modal untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya (Khudori, 2005).

Setiap negara tidak mungkin secara alami dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa hanya dari produksi dalam negeri. Setiap negara membutuhkan *supply* produk tertentu dari negara lain dan berkembanglah aktivitas perdagangan atau transaksi atau jual beli, dan ekspor impor. Indonesia sebagai negara agraris meskipun potensinya besar untuk memproduksi hasil pertanian, namun tetap harus melakukan impor hasil pertanian. Persoalannya adalah, bahwa produk pertanian yang diimpor tersebut sebagian diantaranya dapat diproduksi dengan baik di dalam negeri, misalnya beras, jagung, kedelai, ternak, buah-buahan, tanaman obat, gula dan lain-lain.

Ancaman krisis pangan di Indonesia, selain disebabkan semakin menyusutnya lahan pertanian pangan, juga dipicu oleh besarnya ketergantungan pada produk pangan impor, dengan tren yang semakin meningkat. Membanjirnya produk pangan impor dengan harga murah, lambat laun menghancurkan daya tahan pertanian di dalam negeri.

Namun kita tidak bisa menutup diri dari produk impor karena kita pun akan mendorong ekspor yang berarti impor bagi negara lain, yang dapat kita lakukan menurut Nuhung (2003) adalah bagaimana mengendalikan impor produk pertanian yang dapat diproduksi dalam negeri dengan empat strategi yaitu:

a. Daya tangkal

Secara alami tidak mungkin produk impor masuk ke Indonesia jika saja produk pertanian kita bisa memenuhi persyaratan :

- kualitas yang minimal sama dengan produk impor apalagi jika lebih baik
- efisiensi produk, dengan harga yang lebih rendah dari harga impor. Yang sering terjadi, produk impor sering kali lebih murah dengan kualitas yang lebih baik dari produk lokal.
- kontinuitas *supply* dan dapat diakses oleh konsumen

b. Kebanggaan dan kecintaan terhadap produk dalam negeri

Jika daya tangkal masih lemah, maka yang perlu dikembangkan adalah jiwa dan semangat nasionalisme untuk mencintai produk dalam negeri meskipun sedikit lebih mahal atau kualitasnya sedikit lebih rendah.

c. Non tarif barrier

Jika kedua hal di atas belum berhasil, dapat dikembangkan dan dimungkinkan dalam WTO misalnya *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *safeguard*. dengan alasan kesehatan, hama dan penyakit serta keamanan pangan impor dapat dilarang

d. Instrumen tarif

Jika semua strategi di atas belum bisa mengendalikan impor, maka impor hanya bisa dikendalikan dengan tarif bea masuk (TBM). Dengan adanya TBM selain memberikan pendapatan bagi negara, produk impor juga harganya akan lebih tinggi sehingga pengusaha importir tidak termotivasi melakukan impor.

Sejak diberlakukannya AFTA 2003 yang menganut prinsip *minimize barrier* perdagangan, semakin sulit untuk membendung impor hasil pertanian. Globalisasi dalam berbagai aspek sosial ekonomi pada kenyataannya telah menjadi ancaman serius bagi usaha membangun ketahanan pangan jangka panjang, walaupun disadari pula menjadi peluang jika dapat diwujudkan suatu perdagangan internasional pangan yang adil (*fair trade*).

Selain masalah impor yang tak terkendali, terjadi pula disparitas harga pangan di berbagai daerah terutama disebabkan pengaruh kelebihan pangan atau kelangkaan pangan. Peran pengendalian atau stabilisasi harga serta pendistribusian pangan dari pemerintah agar petani tidak menderita kerugian belum maksimal nyata terlihat. Adanya panen yang tidak serentak serta kondisi geografis merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya disparitas harga tersebut yang memerlukan perhatian serius pemerintah. Disparitas harga juga terjadi karena panjangnya rentang pemasaran yang harus dilalui hingga tiba ke tangan konsumen, selain itu pengaruh banyaknya permintaan serta penawaran mengakibatkan timbulnya spekulasi pasar untuk kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya *benefit-oriented* seperti penimbunan stok pangan, menaikkan harga, dan lain-lain.

Meningkatkan pola kemitraan dengan investor di sektor pertanian sebagai bagian dalam mengaktifkan program ketahanan pangan saat ini perlu digalakkan untuk tanaman

pangan karena kemitraan yang berkembang luas saat ini hanya berkisar pada tanaman perkebunan, meski dalam dunia perdagangan sektor pertanian banyak melibatkan kemitraan dengan pengusaha yang bergelut di dunia pertanian. Pola kemitraan untuk tanaman pangan yang sudah berjalan di beberapa daerah seperti kubis, wortel, tomat, kentang, serta tanaman hortikultura lainnya masih dapat dihitung dengan jari. Kemitraan yang terbina ini sangat membantu meningkatkan kualitas dan mutu hasil tani karena sebagian besar hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan ekspor. Selain itu, banyak sisi petani mitra diuntungkan karena hasil tani sudah jelas pasarnya, pupuk disediakan beserta alat mesin pertanian (alsintan) serta ketatnya pengawasan dari mitra yang membuat petani meningkatkan kedisiplinan pengelolaan usaha taninya.

Peran dunia perbankan dan non perbankan (koperasi dan mitra usaha tani) dalam memberikan bantuan kepada usaha tani untuk bisa melakukan ekspansi usaha masih minim dilakukan meski pemerintah telah menganjurkan pemberian kredit usaha tani dengan bunga yang rendah namun banyaknya syarat-syarat serta aturan yang harus dipenuhi membuat petani kesulitan memperoleh dana bantuan tersebut, sehingga pilihan mereka jatuh dengan meminjam pada tengkulak dan lintah darat dengan menggadaikan barang yang dimiliki. Memang problematika yang dialami oleh dunia perbankan adalah kepastian pengembalian dana yang dipinjamkan kepada petani, mengingat dunia pertanian sangat rentan kepastian hasil yang diperoleh.

- Sub Sistem Kependudukan

Jumlah penduduk Indonesia yang kian berjubel membutuhkan penanganan yang serius terkait dengan pemenuhan pangan. Penduduk Indonesia yang berjumlah \pm 220 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49 % pertahun mengindikasikan terjadinya penambahan penduduk sekitar 3 hingga 4 juta jiwa pertahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk perlu diantisipasi dengan peningkatan produksi pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, selain itu pembatasan jumlah kelahiran oleh pemerintah untuk menekan laju penambahan penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB). Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi pula, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa.

Generasi modern saat ini enggan untuk terjun dalam dunia pertanian yang dianggap pekerjaan untuk kalangan miskin, tidak menguntungkan, bersifat tradisional, serta menganggap pekerjaan ini hina. Meski sektor ini meraup tenaga kerja yang begitu besar namun jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sehingga mengancam pada hilangnya golongan petani yang berkompeten dan berpengalaman di bidang ini. Sektor pertanian menunjukkan tren *aging agriculture*, yaitu suatu kondisi dimana tenaga kerja yang berada di sektor ini adalah tenaga kerja yang berusia lanjut (Saraswati Soegiharto, 2004)

Dengan sekitar 60 % penduduk Indonesia yang menetap di daerah pedesaan dengan 44,3 % yang terserap pada sektor ini sebagai tenaga kerja menggambarkan peran penting sektor ini dalam mengurangi angka pengangguran, namun produktifitas tenaga kerja sektor pertanian merupakan terendah dibanding sektor lain. Hal ini dikarenakan 81 % tenaga kerja pertanian berpendidikan rendah, ditambah golongan yang masih berminat mengelola usaha tani didominasi orang berusia lanjut. Ke depannya sektor ini mengalami masa suram karena terancam kehilangan peminat. Membangun kembali persepsi masyarakat akan potensi sektor pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan serta keuntungan yang dapat diperoleh

dengan pengelolaan yang baik tentunya akan sangat berguna untuk memantapkan sektor ini yang dulunya dikenal sebagai *leading sector*.

Tabel 2. Penyebaran Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2002

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Jumlah Tenaga Kerja di sektor pertanian (1) a. Tahun 2002 b. Tahun 2009 (perkiraan)	40,634 juta (44,3 %) 42,4 Juta
2	Sebaran TK menurut sub sektor th 2002 (2) a. Tan.pangan/palawija/hortikultura/perkebunan b. Peternakan c. Mixed farming d. Jasa pertanian Total (tdk termasuk perikanan, kehutanan)	34.921.185 (84,15 %) 2.706.135 (6,91 %) 601.665 (1,53 %) 944.298 (2,41 %) 39.173.283
3	Angka produktivitas sektor pertanian (4) a. Tahun 2002 b. Tahun 2003	Rp. 1,69 juta/orang Rp. 1,68 juta/orang
4	Sebaran TK menurut umur th 2002 (2) a. 10 - 24 b. 25 - 44 th c. > 45 th	6.184.551 (16 %) 18.128.777 (46 %) 14.859.955 (38 %)
5	TK pertanian menurut tk. pendidikan th. 2002 (2) a. < SD b. SLTP c. SLTA d. PT	38.210.995 (81,68 %) 5.028.849 (12,84 %) 2.042.619 (5,21 %) 107.226 (0,27 %)
6	Curahan jam kerja th. 2002 (2) a. Kurang 35 jam/mg b. Lebih 35 jam/mg	23.268.178 (59 %) 15.905.105 (41 %)
7	Rumah Tangga petani gurem (2) a. Tahun 1993 b. Tahun 2003	52,66 % 56 %
8	Peningkatan Jumlah RT pertanian th 2002 (2) a. Jawa b. Luar Jawa c. Indonesia	1,97 % 2,74 % 2,31 %
9	Penduduk miskin bekerja di sektor pertanian (3) a. Th. 2002 b. Th. 2003	20.604.600 (57,8 %) 22.250.600 (59,6 %)
10	Setengah Penganggur di Sektor Pertanian th 2002 (2)	70,2 %

Sumber :

- 1) Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004 - 2009
- 2) Andi Nuhung, 2004
- 3) BPS, 2003
- 4) Balitfo, 2004

- Sub Sistem Politik dan kelembagaan

Lebih kurang satu dasawarsa masyarakat Indonesia mengalami ketidakpastian harga bahan pangan. Dimulai dari gejolak harga yang selalu merengsek naik sampai pada kelangkaan bahan pangan di pasaran. Pemerintah harus menetapkan kebijakan untuk menetapkan strategi stabilisasi harga. Ini karena selama ini stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah bersifat ad hoc dan sporadis. Strategi besar sangat diperlukan untuk menangani gejolak harga komoditas pertanian saat ini. Kebijakan stabilitas makro ekonomi penting sangat penting dilakukan melalui kebijakan moneter maupun fiskal yang mampu menggerakkan sektor riil terutama sektor pertanian dan agroindustri.

Terlebih dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa ketahanan pangan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Meskipun secara sistem yang berjalan pengintegrasian ketahanan pangan masih bersifat sentralistik karena seluruh produksi pangan disetorkan dulu ke pusat untuk kemudian dibagikan secara merata ke daerah. Hal ini tidak sepenuhnya salah dikarenakan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini memerlukan pengaturan yang baik dengan mengacu pada prinsip kesamarataan. Meskipun yang mengetahui kondisi ketahanan pangan suatu masyarakat adalah daerah dalam hal ini pemerintah setempat sehingga kecukupan pangan daerah tersebut (sebagai bagian dari otonomi daerah) harus diutamakan dulu kemudian kelebihan atau kekurangan barulah diatur dengan pemerintah pusat yang menurut sebagian kalangan perlu diterapkan juga tidak salah. Namun, jika hal ini terjadi bisa saja kesenjangan antar daerah akan terjadi dan akan sangat terlihat jelas segmen-segmen kesejahteraan di daerah yang tentunya tidak kita inginkan karena akan mengarah pada stabilitas politik dan keamanan. Alangkah baiknya jika kita bisa memulai membangun kapasitas ketahanan pangan secara integratif dengan menerapkan kebijakan yang bersifat *bottom-up*.

Seringkali kebijakan yang bersifat *bottom-up* dibuat setelah muncul kasus-kasus besar. Faktor efektivitas dan ketepatan kebijakan hanya berorientasi sesaat. Sejarah membuktikan bahwa ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan atau ketahanan nasional. Untuk itu, perencanaan awal yang melingkupi seluruh segmen berpengaruh akan sangat membantu mengatasi timbulnya permasalahan-permasalahan besar dikemudian hari.

Untuk penguatan ketahanan pangan, pemerintah kemudian memberikan insentif berupa subsidi untuk input pertanian guna mendorong produksi pangan. Subsidi tersebut diberikan untuk pupuk, bibit unggul, dan alsintan (alat mesin pertanian). Namun subsidi untuk distribusi/kegiatan penyaluran pangan yang memerlukan dana yang tidak sedikit belum mendapat perhatian pemerintah.

Pembukaan keran impor sebagai bagian dari AFTA serta aplikasi dari AoA yang telah disepakati turut mewarnai kondisi carut marut ketahanan pangan bangsa ini. Memang salah satu solusi untuk menambah kekurangan produksi dalam negeri adalah dengan melakukan impor yang selain harganya lebih murah dan dengan mutu yang lebih berkualitas, bahkan predikat negara importir terbesar di dunia juga berhasil diraih oleh bangsa ini. Hingga Tahun 2007, Indonesia mengimpor sekitar 2,5 juta ton beras/ tahun (terbesar di dunia); 2 juta ton gula/ tahun (terbesar kedua); 1,2 juta ton kedelai/ tahun; 1,3 juta ton jagung/ tahun; 5 juta ton gandum/ tahun; dan 550.000 ekor sapi/ tahun. Tentunya hal ini justru semakin memalaskan kita untuk bisa bangkit mengandalkan produksi sendiri akibatnya Indonesia dapat dengan mudah dipermainkan oleh situasi pasar internasional. Upaya yang harus dilakukan pemerintah

untuk memantapkan ketahanan pangan adalah dengan peningkatan pasokan (produksi) dan penurunan permintaan (konsumsi) pangan serta diversifikasi pangan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi.

Semakin banyaknya penduduk miskin memberikan dilema bagi dunia pertanian sebagai basis ketahanan pangan. Di satu sisi perlu di sediakan pangan yang murah dan terjangkau bagi kaum miskin yang berarti menyebabkan harga pangan anjlok, sedang disisi lain harga pangan yang murah tentunya merugikan golongan petani. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan keduanya, salah satunya dengan membeli pangan petani dengan harga yang pantas untuk kemudian memberikan subsidi harga jual terhadap pangan tersebut guna menyediakan pangan murah kepada masyarakat. Jika hal ini bisa berjalan dengan baik, petani tidak akan dipusingkan lagi mengenai pemasaran hasil taninya ataukah dipusingkan dengan harga pangan yang mengalami fluktuasi sehingga sektor ini bisa terus termotivasi untuk meningkatkan produktifitasnya.

Menggiatkan kelompok-kelompok tani pada usaha peningkatan ketahanan pangan dengan disertai giatnya aparat terkait melakukan penyuluhan (tidak hanya menyangkut usaha tani, tetapi juga pemahaman akan gizi dan pengaturan konsumsi) akan turut membantu. namun, meskipun telah dikembangkan kelompok-kelompok tani sejak 3 - 4 dasawarsa yang lalu, namun efektivitasnya terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani belim memadai. kelembagaan pendukung pembangunan pertanian seperti kelembagaan pasar, kelembagaan keuangan, kelembagaan komoditas, belum dapat secara baik diakses oleh petani. Program pembangunan lumbung desa sebagai aksi pemantapan ketahanan pangan ditingkat regional saat ini patut juga digelar secara optimal untuk mengantisipasi kerawanan pangan di tengah kondisi pakeklik ketika musim kemarau melanda.

Memantapkan ketahanan pangan dengan mendirikan badan ketahanan pangan di daerah-daerah diharapkan mampu mendorong kebijakan fiskal melalui alokasi anggaran belanja pemerintah dan penetapan pajak yang berpihak kepada ketahanan pangan rakyat serta mendorong kebijakan moneter melalui pengelolaan tingkat bunga dan pengembangan sistem pembiayaan yang sesuai.

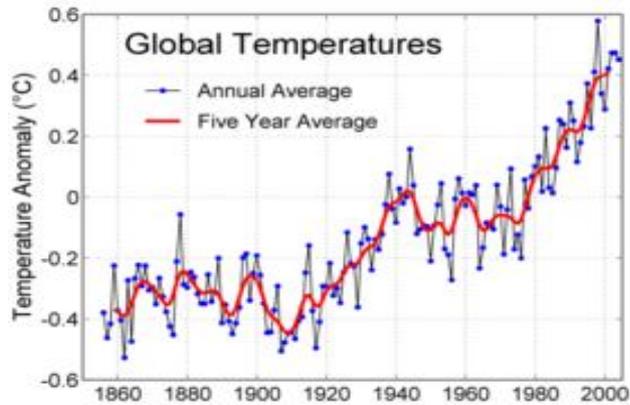
- Sub Sistem Ekologis

Rapuhnya ketahanan pangan saat ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung yang bekerja sesuai dengan sistemnya sendiri yaitu faktor ekologis. Sistem yang tanpa manusia pun dapat berjalan seimbang ini tengah mengalami kerusakan akibat pengelolaan yang tidak terencana dan bersifat eksploratif.

Salah satu masalah ekologis yang timbul adalah perubahan iklim yang tidak lagi dapat ditebak dan cenderung menunjukkan gejala yang bersifat “pembalasan” atas kerusakan yang dilakukan manusia. Hujan yang terus menerus turun, badai, angin ribut, dan tingginya gelombang laut sehingga berdampak pada banyaknya sawah yang terancam gagal panen akibat banjir, tidak melautnya nelayan yang berdampak pada melonjaknya harga ikan di pasaran, bahkan dampak terparah yang ditimbulkan yaitu terhentinya aktifitas perekonomian dan akses akibat jembatan yang terputus karena terjangan banjir, dan hujan yang tidak berhenti.

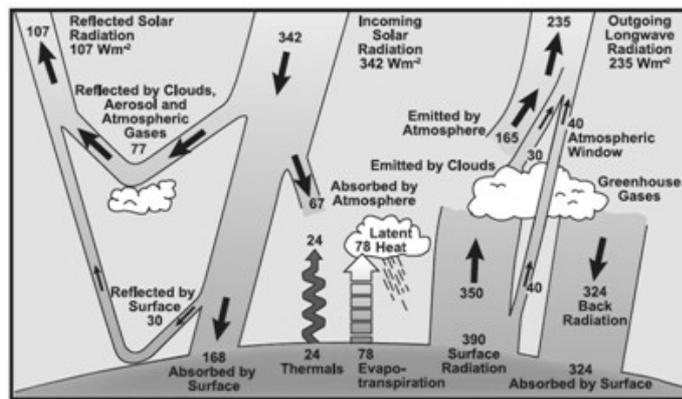
Pemanasan global (*global warming*) adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan bumi, yaitu kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari (gelombang panas/inframerah) yang dipancarkan bumi oleh gas-gas rumah kaca (efek rumah kaca adalah istilah untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar). Gas-gas ini secara alami terdapat di udara (atmosfer). Timbulnya masalah

pemanasan global yang terjadi akibat komposisi kimiawi dari atmosfer sedang mengalami perubahan sejalan dengan penambahan gas rumah kaca –terutama karbon dioksida, metan dan asam nitrat. Berkurangnya kapasitas dan jumlah tanaman penyuplai O₂ (oksigen) yang bersifat mendinginkan kondisi permukaan bumi.



sumber: Wikipedia Indonesia,

Gambar 2. Temperatur rata-rata global 1850 sampai 2006 relatif terhadap 1961–1990



Source: IPCC (2007)

Gambar 3. Sistem kesetimbangan panas di bumi

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mempublikasikan bahwa selama tahun 1990-2005, ternyata telah terjadi peningkatan suhu merata di seluruh bagian bumi, antara 0,15 – 0,3° C. Jika peningkatan suhu itu terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2040 lapisan es di kutub-kutub bumi akan habis meleleh.

Di Indonesia, sepanjang tahun 1980-2002, suhu minimum kota Polonia (Sumatera Utara) meningkat 0,17° C per tahun. Sementara, Denpasar mengalami peningkatan suhu maksimum hingga 0,87° C per tahun. Tanda yang kasat mata adalah menghilangnya salju yang dulu menyelimuti satu-satunya tempat bersalju di Indonesia, yaitu Gunung Jayawijaya di Papua. Diperkirakan dalam 30 tahun mendatang sekitar 2.000 pulau di Indonesia akan tenggelam.

Kondisi cuaca ekstrim akan menjadi peristiwa rutin. Badai tropis akan lebih sering terjadi dan semakin besar intensitasnya. Gelombang panas dan hujan lebat akan melanda area yang lebih luas. Risiko terjadinya kebakaran hutan dan penyebaran penyakit meningkat. Sementara itu, kekeringan akan menurunkan produktivitas lahan dan kualitas air. Kenaikan

muka air laut akan memicu banjir lebih luas, mengasinkan air tawar, dan menggerus kawasan pesisir. Ternyata sektor pertanian dan peternakan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi GRK di atmosfer. Dari sektor pertanian, emisi GRK dihasilkan dari sawah yang tergenang, pemanfaatan pupuk, pembakaran padang sabana, dan pembusukan sisa-sisa pertanian. Sektor pertanian menurut *The First National Communication* secara umum menghasilkan emisi GRK hanya sekitar 8 %. Namun sektor ini menghasilkan emisi gas metana tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Sementara dari sektor peternakan, emisi GRK berupa gas metana (CH₄) dilepaskan dari kotoran ternak yang membusuk. Sesungguhnya untuk mengurangi emisi GRK dari sektor ini, kotoran ternak dapat diolah untuk menjadi biogas, bahan bakar yg ramah lingkungan.

Meningkatnya laju konversi lahan produktif baik lahan tanaman pangan, perkebunan, serta kehutanan menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah tanaman. Menciutnya lahan yang dikelola di bidang pertanian juga menyebabkan daerah serapan air semakin berkurang yang berdampak pada kapasitas simpan air tanah yang semakin berkurang, dapat menimbulkan erosi, serta dampak tanah longsor. penyusutan luas lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan, misalnya, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, alih fungsi lahan besar-besaran terus terjadi, sehingga mengancam kelangsungan provinsi itu sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Dari dimensi kesehatan, berkurangnya tanaman dapat menyebabkan berkurangnya udara bersih yang dapat meningkatkan kadar radiasi ultraviolet ke bumi yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit kanker kulit serta penyakit lainnya. sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanaman melalui proses fotosintesisnya akan mengambil karbondioksida (CO₂) dari udara yang kemudian digunakan sebagai salah satu komponen dasar dalam fotosintesis untuk menghasilkan udara bersih (O₂).

Usaha tani dengan menggunakan bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan dapat menjadikan lahan berada pada kondisi kritis karena terjadi eksplorasi terhadap kesuburan tanah, akibatnya hasil pangan pun berkurang bahkan banyak yang gagal tumbuh. Disamping itu dampak bahan kimia juga bisa menyebabkan hasil pangan tercemar secara akumulatif di tambah pencemaran air yang kemudian dimanfaatkan oleh organisme lain selain manusia sendiri.

Perlu disadari bersama bahwa kegiatan pertanian yang dilakukan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Aktivasi fungsi tanah yang terlibat dalam pengolahan mampu menaikkan taraf kesuburan tanah dengan terjadinya peningkatan daya ikat air oleh tanah melalui konservasi sumberdaya tanah dan air, pertanian juga mampu melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga kelestarian sumber air, mengendalikan banjir, dan dapat dimanfaatkan sebagai lanskap dan wisata agro yang indah. Memanfaatkan dengan lebih optimal berbagai bentuk sumberdaya lahan (lahan kering, lahan rawa, lahan pasang surut) untuk kepentingan pemantapan produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani.

Mengubah konsep pertanian ke arah pertanian organik selain tidak mengganggu keseimbangan alam, tidak berbahaya bagi kesehatan, juga lebih murah dan dapat diperoleh serta dibuat sendiri. Penemuan bokashi sebagai pupuk organik yang baru-baru ini ditemukan dan digalakkan penggunaannya ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman lebih baik dibanding pupuk sintesis, pembuatannya pun sangat mudah hanya dengan memanfaatkan sampah rumah tangga, eceng gondok, dan sekam kayu yang kemudian diaktifkan dengan menggunakan mikroba EM (*Efektive Microorganism*). Terkait hal tersebut pengaturan jadwal tanam, pergiliran tanaman, serta penggunaan predator biologis alami dapat diberlakukan untuk mengganti fungsi pestisida yang selama ini digunakan.

Penyumbang protein terbesar pun tidak berdaya dalam hal kuantitas produksinya terhadap ketahanan pangan nasional sebagai pangan hewani dikarenakan rusaknya terumbu karang akibat penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang bersifat merusak seperti pukot harimau, bom, dan racun. Seperti diketahui terumbu karang merupakan tempat bagi ikan-ikan dan hewan laut untuk berkembang biak dan berdomisili. Sebagai akibat eksploitasi destruktif tersebut menyebabkan banyak bibit ikan dan hewan laut lainnya yang mati sehingga keberlangsungan ke depannya masih merupakan tanda tanya besar. Meskipun berdasarkan data Departemen Perikanan dan Kelautan luas laut Indonesia seluas 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia sebesar 81.000 km dengan potensi sebanyak 6,26 juta ton pertahun, namun yang masih dimanfaatkan baru sekitar 76 % dengan tingkat produksi sebesar 3.82 juta ton.

- Sub Sistem Sosial dan budaya

Persepsi petani yang menganggap pekerjaan di dunia pertanian tidak lagi menguntungkan sehingga beralih profesi tidak sepenuhnya salah. Hal ini wajar dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan atas penghargaan yang diberikan pemerintah dengan banyaknya ketidakberpihakan yang diterima oleh petani. Harga bibit yang melonjak, hasil panen yang dihargai dengan murah di pasaran, alsintan pendukung yang tidak terjangkau, serta mahalnya pupuk, diperparah dengan tidak adanya perbaikan infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, sarana transportasi semakin membuat pelik dunia kelayakan pertanian.

Dilihat dari persepsi masyarakat, bagi masyarakat Indonesia mengonsumsi beras memiliki nilai sosial lebih tinggi dibanding dengan bahan pangan lainnya oleh karena persepsi yang selama ini dibangun dan akibat kebijakan yang kurang bijak dari pemerintah di masa silam yang menjadikan beras sebagai makanan pokok orang Indonesia. Padahal tidak semua orang Indonesia memiliki pola pangan pokok berupa nasi akhirnya dibiasakan makan nasi. akibatnya permintaan akan beras selalu meningkat karena *mind set* masyarakat kita terlanjur di doktrin bahwa jika belum makan nasi itu artinya belum makan. oleh karena itu sangat diperlukan pembelajaran kepada masyarakat bahwa sumber utama energi / karbohidrat tubuh kita tidak hanya berasal dari nasi tapi ada sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, sagu dan lain-lain berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah.

Jadi kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah janganlah dihilangkan. keberagaman sumber pangan janganlah dipersempit. Justru hal tersebut harus dikembangkan dan dipelihara sehingga daerah tersebut menjadi daerah dengan ketahanan pangan yang tangguh dengan berbasis komoditas lokal unggulan

Di beberapa daerah di Indonesia masalah pangan juga berdampak pada perlakuan gender, misalnya ditingkat konsumsi dimana ketika makan terlebih dahulu mendahulukan kaum lelaki baru kemudian kaum wanita, bahkan ada juga budaya makan dengan mendahulukan orang dewasa atau orang tua kemudian anak-anak. Hal ini tentunya bertentangan dengan dunia kesehatan yang lebih menganjurkan asupan makanan bagi anak-anak terlebih dahulu karena masih berada pada tahap pertumbuhan sedangkan orang dewasa hanya merupakan tahap pertahanan lebih lanjut karena kondisi yang lebih mapan dan optimum di banding anak-anak.

Ketahanan pangan juga perlu memperturutkan kesetaraan dan sensitifitas gender. Dalam skala global, semua perempuan di belahan dunia terbukti terlibat dalam proses panjang rantai makanan, baik sebagai produsen makanan, pencari nafkah yang bertanggung jawab terhadap kondisi makanan keluarga, menyimpan makanan maupun sebagai pihak yang memproses dan menyiapkan makanan untuk menjaga kesehatan dan aktivitas keluarga. Perempuan juga

mengurus ternak, meramu makanan ternak, mencari kayu bakar, serta mengelola asupan air untuk keperluan rumah tangga. Sehingga kebijakan penempatan perempuan sebagai *gate keeper* dalam ketahanan pangan rumah tangga amat sangat penting peranannya (Khudori, 2005)

Pemerintah saat ini memberlakukan kembali program transmigrasi yang diyakini akan semakin membantu penguatan ketahanan pangan nasional. Sebagian petani berada dalam kondisi miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya (*they are poor because they are poor*) Berlangsungnya program transmigrasi tentunya akan semakin memberdayakan masyarakat serta mengurangi pengangguran dengan penciptaan lahan pertanian baru di daerah-daerah transmigrasi. Namun, perlu diperhatikan kondisi lahan, curah hujan, jaringan irigasi, serta akses pasar dan infrastruktur lainnya pada daerah transmigrasi agar masyarakat mau berperan pada program tersebut dan meyakini bisa berkembang di daerah *trans* tersebut. Keberhasilan program ini tidak hanya akan memenuhi ketersediaan pangan rumah tangga namun juga dapat meningkatkan ketersediaan pangan daerah tersebut.

STRATEGI TOTALITAS KOMPONEN KARYA KETAHANAN PANGAN

Secara garis besar, kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pembangunan pertanian terbatas pada aspek pengaturan, penetapan standar, pedoman dan norma. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 7, ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Indonesia juga perlu mengembangkan dengan cepat bidang-bidang yang memiliki *comparative advantage*, yaitu perkebunan, pertanian pada umumnya, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Dalam rangka mematuhi azas-azas desentralisasi Pemerintah pusat dan Propinsi, maka Pemerintah Kabupaten melaksanakan perannya sesuai kewenangan otonominya namun tetap dalam kerangka sistem yang lebih luas, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dipertimbangkan keterkaitan timbal balik dengan kehidupan budaya lokal sosial ekonomi dari tingkat lokal (daerah), regional, hingga masyarakat ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya pemantapan program ketahanan pangan dan agribisnis.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000, maka pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan di kabupaten yang dijabarkan dalam program pembangunan sistem ketahanan pangan, diletakkan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan masyarakat yang lebih memberikan peluang pada partisipasi aktif masyarakat (Hamzah, 2007).

Disadari bahwa tidak semua daerah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, baik dimulai saat produksi, distribusinya maupun yang akan dikonsumsi oleh penduduk. Dan sebagai akibat tidak mempunyai suatu daerah/ masyarakat/ rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan pada penduduk/rumah tangga, maka kemungkinan akan terjadi kerawanan pangan pada penduduknya/rumah tangganya.

Sistem ketahanan pangan perlu dikembangkan di daerah yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan lokal, kelembagaan dan budaya lokasi dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah serta mutu yang dibutuhkan pada

tingkat harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan peningkatan pendapatan petani nelayan beserta keluarganya di pedesaan. Agar dapat tercapainya kondisi yang demikian harus didukung dengan kondisi alam yang baik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, penerapan teknologi dan kemampuan sumberdaya manusia yang memadai pula.

Pada kondisi sebelum krisis ekonomi, tingkat konsumsi pangan mengalami peningkatan, namun pada waktu krisis ekonomi sebagian besar konsumsi jenis pangan mengalami penurunan. Prevalensi gizi buruk dan kualitas sumber daya manusia adalah berbeda di setiap daerah sesuai dengan permasalahan dan potensi daerahnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional harus dimulai dengan penguatan ketahanan pangan daerah yaitu dengan melakukan advokasi yang lebih kepada pemerintah daerah.

Situasi ketahanan pangan secara nasional dari waktu ke waktu telah membaik. Sebagian besar produksi pangan mengalami peningkatan dan rasio impor pangan terhadap ketersediaan pangan dalam negeri juga relatif kecil. Bahkan ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein sudah melebihi dari yang dianjurkan. Namun dengan memperhatikan kinerja ketahanan pangan secara nasional saja tidaklah cukup. Kenyataannya permasalahan kurang gizi dan kualitas sumber daya manusia muncul dimana-mana.

Kerawanan pangan yang saat ini mendera bangsa kita sebaiknya dijadikan cambuk kepada seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bisa secara bersama-sama mengatasi persoalan ini. Bekerjasama dengan meningkatkan koordinasi serta pelaksanaan pemantauan dan pengawasan di lapangan akan sangat membantu menjawab tantangan ketahanan pangan ke depannya.

PENUTUP

Ketahanan pangan sebagai landasan mewujudkan masyarakat yang sejahtera memerlukan kontribusi secara maksimal seluruh *stakeholder* dan masyarakat. Ketahanan pangan sebagai suatu sistem yang diperkuat oleh subsistem-subsistem pendukung lainnya memerlukan sinkronisasi dan pengintegrasian pengamatan dalam mengambil suatu tindakan dan kebijakan. Ketahanan pangan dikatakan sukses jika mampu menjangkau kecukupan pangan ditingkat rumah tangga (termasuk individu), daerah, dan nasional dengan mengandalkan kemampuan pangan lokal, inilah yang disebut dengan kedaulatan pangan.

Masalah ketahanan pangan adalah masalah bersama yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu perlu dikembangkan suatu komitmen dan kerjasama diantara semua pihak terutama dalam bentuk kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (yang antara lain direpresentasikan oleh kalangan LSM dan perguruan tinggi). Dalam hal ini, Dewan Ketahanan Pangan yang telah didirikan dari sisi pemerintah, perlu diperkuat dan dilengkapi dengan forum atau lembaga lain yang mampu menampung partisipasi swasta, LSM dan perguruan tinggi.

Peningkatan produksi didukung oleh pendistribusian secara merata serta pengetahuan konsumsi masyarakat yang meningkat hanya merupakan sebagian kecil subsistem yang selama ini mendapat perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan. Tiga hal pokok ini saja yang dijadikan prioritas juga masih kacau balau pelaksanaannya, apalagi jika diperdalam pada subsistem-subsistem lainnya seperti faktor ekologis, sosial budaya, politik dan kelembagaan, ekonomi serta kependudukan yang juga turut berperan pada roda sistem ketahanan pangan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi dan timbulnya pandangan sektoral dalam usaha peningkatan ketahanan pangan ini, permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tidak pernahnya dilakukan penyamaan visi dan pertemuan bersama untuk membahas secara holistik,

integratif dengan menggunakan perpaduan kolaborasi fungsi yang saling memperkuat. Penciptaan iklim seperti ini tentunya memerlukan peran total semua subsistem dengan didukung perhatian pemerintah secara serius dan berkelanjutan. Guna menyelami pemaknaan cita-cita pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, berkeadilan dan penuh kemakmuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Mewa. 2006. *Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional*. Pusat analisis sosial ekonomi dan kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Aziz, Sholehudin A. *Krisis Tempe Akibat Kebijakan Salah*. [On-line]. <http://www.uinjkt.ac.id/index.cfm?module=article.display&recordid=2191&categoryid=123>. Verified Tanggal 25 Februari 2008.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang. 2005. *Pola Pangan Harapan*. http://www.nakertrans.go.id/tkn/potret_tk.php. Diakses pada Tanggal 19 Februari 2008.
- Hamzah, Abidin. *Kecukupan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat*. [On-line]. <http://bukpd.ntb.go.id/web/content/blogcategory/39/52/in/> (verified 25 Februari 2008)
- Khudori. 2005. *Lapar : Negeri Salah Urus*. Resist Book. Yogyakarta
- Krisnamurthi, Bayu., 2003. *Agenda Pemberdayaan Petani Dalam Rangka Pemanfaatan Ketahanan Pangan Nasional*. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_19/artikel_3.htm. diakses pada Tanggal 6 Januari 2008
- Media Indonesia, 2007. *Ketahanan Pangan dan Kemajuan Bangsa*. Terbit Tanggal 30 Oktober 2007. Jakarta
- Nuhung, I. A., 2003. *Menbangun Pertanian Masa Depan*. Aneka Ilmu, Jakarta
- PPK-LIPI. 2005. *Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Perdesaan: Konsep Dan Ukuran*. <http://www.ppk.lipi.go.id/file/publikasi/KETAHANAN%20PANGAN%20RUMAH%20TANGGA.doc>. Diakses pada 8 Januari 2008
- Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2000 Tentang Ketahanan Pangan*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.
- Siswono Y.H., 2003. *Membangun Kemandirian Di Bidang Pangan: Suatu Kebutuhan Bagi Indonesia*. Artikel HKTI. Jakarta
- Sibuea, Posman., 2007. *Wajah Buram Ketahanan Pangan*. <http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/76894>. Diakses pada Tanggal 15 Januari 2008.
- Saraswati Soegiharto. 2004. *Potret Tenaga Kerja di Sektor Pertanian*. http://www.nakertrans.go.id/tkn/potret_tk.php. Diakses pada Tanggal 19 Februari 2008
- Tahun 2040 = 2.000 Pulau Tenggara* http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/070724_prbhn_iklim_cu/ (verified Tanggal 25 Februari 2008)
- Wikipedia Indonesia. *Pemanasan Global* [On-line]. Available at http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global (verified Tanggal 25 Februari 2008)